



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, peneliti menemukan potensi bias dapat terjadi pada empat dari lima tahap keseluruhan aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*. Berbagai potensi bias dapat terjadi pada tahap monitoring isu, pencarian bukti, penulisan, serta tahap penyuntingan dan publikasi. Selain itu, peneliti juga mendapati bahwa terdapat kegiatan dan tahapan *fact-checking* di *Tirto.id* yang tidak berpotensi bias, yakni kegiatan pemisahan klaim dalam tahap monitoring isu, serta tahap pemberian *rating* (penilaian) suatu isu atau unggahan dengan skala kebenaran. Berikut simpulan dari temuan potensi bias yang dapat atau tidak muncul dalam lima tahap aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*.

##### 1. Tahap Monitoring Isu

Dalam tahap monitoring isu aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*, peneliti melihat adanya potensi *bias by omission* (bias selektivitas isu) yang rentan terjadi pada tahap ini. Potensi *bias by omission* dapat terjadi karena selektivitas isu didasarkan bukan pada bingkai etis pemberitaan, tetapi didasarkan pada pertimbangan dan keputusan individu pemeriksa fakta dan editor konten *fact-checking*, kerja sama organisasi media, serta kebijakan redaksi dari organisasi media *Tirto.id*. Pada pertimbangan individu pemeriksa fakta, terdapat faktor

dugaan dan pengetahuan dasar individu pemeriksa fakta atau editor yang rentan menjadi dasar keputusan isu yang akan dikaji, baik isu yang viral atau tidak. Selanjutnya, pada pertimbangan individu editor konten *fact-checking*, editor mendasarkan selektivitas isu pada risiko keamanan dan keberlangsungan *newsroom Tirto.id*. Editor berpotensi tidak mendasarkan selektivitas isu pada nilai berita, atau bingkai etis praktik jurnalistik tertentu.

Selain itu, terdapat faktor rekanan atau kerja sama organisasi media yang turut memengaruhi pertimbangan selektivitas isu. Dalam hal ini, *Tirto.id* menjalin hubungan kerja sama dengan Facebook sebagai *third party fact-checker*. Peneliti menemukan bahwa dasar pertimbangan kerja sama media lebih didahulukan daripada faktor lainnya. Hal ini terbukti dari dasar pertimbangan individu bahkan kebijakan media tunduk pada instruksi sebagai dampak dari kerjasama ini. Selanjutnya, *bias by omission* juga berpotensi muncul karena adanya arahan dan kebijakan media dalam mengatur skala prioritas isu atau unggahan yang diperiksa. Skala prioritas ini tidak semata hanya didasarkan pada isu yang viral di media sosial atau pemberitaan. Kebijakan media ini terwujud sebagai arahan untuk tidak melakukan pemeriksaan fakta pada isu yang dinilai terlalu ringan atau “recek”, walaupun terdeteksi dalam *dashboard* Facebook. Hal ini menyebabkan adanya potensi bias selektivitas isu (*bias by Omission*).

Selain kegiatan penentuan isu atau unggahan yang akan diperiksa dan diskusi topik, tahap monitoring isu juga terdiri dari kegiatan pemisahan klaim yang dapat diperiksa atau tidak oleh pemeriksa fakta *Tirto.id*. Berbeda dengan dua

kegiatan lain dalam tahap monitoring isu, peneliti tidak menemukan adanya potensi bias pada kegiatan pemisahan klaim ini. Hal ini dikarenakan peneliti melihat tahap pemisahan klaim dilakukan dalam setiap proses produksi konten *fact-checking* di *Tirto.id*, tidak hanya pada konten tertentu saja. Selain itu, proses pemisahan klaim ini juga dilakukan berdasarkan bentuk pernyataan dan data yang terbuka, bukan berdasarkan pribadi individu pemeriksa fakta. *Tirto.id* melakukan kegiatan pemisahan klaim pada setiap proses produksi konten *fact-checking*, hal ini dapat meminimalisasi kesalahan dalam pengujian klaim yang tidak dapat diperiksa dan berdampak pada analisis dan hasil penilaian konten *fact-checking* di *Tirto.id*. Peneliti melihat kualitas dan kredibilitas konten *fact-checking* yang disajikan kepada masyarakat juga dapat lebih dipertanggungjawabkan oleh *Tirto.id*. Maka dari itu, peneliti menilai tidak adanya potensi bias atau kecenderungan tertentu yang dapat muncul dan memengaruhi pada tahap ini.

## 2. Tahap Pencarian Bukti

Potensi *bias by the selection of expert* (bias pemilihan narasumber) yang dirumuskan oleh Allen (2015) rentan terjadi pada tahap ini. Hal ini dikarenakan pemeriksa fakta *Tirto.id* tidak melakukan tahap pemeriksaan rekam jejak pada narasumber yang direkomendasikan atau digunakan oleh reporter bantuan saat melakukan peliputan di lapangan. Hal ini dapat memengaruhi ketepatan penggunaan narasumber, baik dari kualitas atau kedekatan (keahlian) narasumber dengan isu yang dibahas, serta memastikan ada atau tidaknya konflik kepentingan

narasumber dengan isu tersebut. Hal ini tidak dilakukan oleh pemeriksa fakta *Tirto.id* dan berpotensi bias pemilihan narasumber secara tidak langsung pada konten *fact-checking*.

Selain potensi bias pemilihan narasumber, *contradictory findings* juga rentan terjadi dalam tahap pencarian bukti dan analisis yang dilakukan. Peneliti melihat bahwa *contradictory findings* merupakan wujud dari potensi bias individu pemeriksa fakta atau editor *fact-checking* di *Tirto.id*. Hal ini didasarkan pada pemeriksa fakta atau editor yang berpotensi cenderung mendasarkan keputusan atau pertimbangan subjektifnya sebagai standar kegiatan *fact-checking*, terutama dalam tahap pencarian bukti. Seperti dalam penentuan bentuk bukti apa yang akan digunakan, atau kecukupan bukti guna membuktikan kebenaran suatu isu atau unggahan tertentu. Hal ini disebabkan tidak adanya panduan minimal kegiatan *fact-checking* sebagai pedoman yang dirumuskan *Tirto.id*, proses didasarkan setiap isu atau unggahan yang berbeda. Tidak adanya panduan minimal terutama dalam tahap pencarian bukti memengaruhi analisis hingga pengambilan kesimpulan pada konten *fact-checking* di *Tirto.id*.

### 3. Tahap Penulisan

Dalam tahap penulisan terdapat kegiatan analisis dan pengambilan kesimpulan dari bukti yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti melihat adanya potensi bias heuristik ketersediaan yang rentan terjadi. Berdasarkan pengalaman, pemeriksa fakta *Tirto.id* yang pernah mendasarkan

tulisan dan pengambilan kesimpulan dari distorsi informasi yang ia dapatkan dari cuitan media sosial *twitter*, serta simpulan pemberitaan media massa nasional. Pemeriksa fakta tidak mendasarkan pada data atau bukti yang ia dapatkan pada tahap sebelumnya. Seharusnya analisis dan simpulan didikte oleh bukti konkret yang didapatkan, bukan dari distorsi informasi pemeriksa fakta. Hal ini merupakan praktik dari bias heuristik ketersediaan. Peneliti menafsirkan hal ini berpotensi terjadi kembali bila pemeriksa fakta tidak memahami, mengenali, dan mengelolanya dengan baik.

#### 4. Tahap Penyuntingan dan Publikasi

Peneliti melihat proses penyuntingan konten *fact-checking* di *Tirto.id* tidak berjalan dengan maksimal karena kurangnya tenaga kerja yang memproduksi konten *fact-checking*. Alhasil, proses penyuntingan konten *fact-checking* hanya berjalan pada satu tahapan dengan satu editor. Penyuntingan tahap kedua baru dilakukan apabila isu yang dikaji berisiko dan sensitif untuk keberlangsungan *newsroom Tirto.id* dan masyarakat. Walaupun tidak langsung berpotensi memunculkan bias, tetapi tidak adanya proses penyuntingan dua tahap ini berpotensi meminimalisasi upaya pemeriksaan bias yang dapat terjadi pada tahap sebelumnya, baik yang dilakukan pemeriksa fakta atau editor tahap pertama. Terlebih, saat editor tahap pertama secara sadar atau tidak juga memiliki bias atau kecenderungan yang memengaruhi konten *fact-checking* yang disuntingnya.

Selanjutnya dalam tahapan publikasi, *bias by omission* (selektivitas isu) juga berpotensi terjadi pada tahap ini. Sejalan dengan bias selektivitas pada tahap monitoring isu, potensi bias ini rentan dilakukan oleh editor yang memiliki wewenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan publikasi atau tidaknya suatu konten. Selain mendasarkan pada nilai berita atau bingkai etis praktik jurnalistik, editor juga menggunakan dasar pertimbangan risiko keamanan dan keberlangsungan *newsroom Tirto.id* dalam memublikasikan konten *fact-checking*. Apabila hal ini tidak dikenali dan dikelola, peneliti menafsirkan risiko keamanan *newsroom* dapat lebih diperhitungkan, dibanding dasar pertimbangan nilai berita atau bingkai etis jurnalistik tertentu.

##### 5. Tahap Pemberian *Rating*

Dalam tahap pemberian *rating* pada aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*, pemeriksa fakta berkewajiban memberikan *rating* atau penilaian berdasarkan skala kebenaran pada isu atau unggahan yang sudah diperiksa secara langsung. Tahap pemberian *rating* ini dilakukan pada *dashboard* Facebook. Berbeda dengan tahapan *fact-checking* sebelumnya, peneliti tidak menemukan satupun potensi bias yang dapat muncul dalam tahap ini. Hal ini dikarenakan pemeriksa fakta hanya perlu melaporkan penilaian kebenaran pada suatu isu atau unggahan yang diperiksa. Penilaian ini pada dasarnya sudah dilakukan pada tahap penulisan, dimana terdapat proses penjabaran, analisis, dan pengambilan kesimpulan. Dalam tahap ini, pemeriksa fakta hanya perlu memberikan penilaian yang sama dengan

tahap penulisan pada isu atau unggahan yang diperiksanya. Alhasil, Facebook dapat memberikan sanksi bila unggahan dinilai salah atau sebagian salah. Maka dari itu, peneliti menilai potensi bias tidak dapat terjadi pada tahap ini.

Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi bahwa *Tirto.id* memiliki tahapan *fact-checking* yang lebih kompleks secara praktis dari penjabaran UNESCO (2019). Peneliti melihat tahap penyuntingan dan publikasi, serta pemberian *rating* tidak termasuk dalam penjabaran tahapan *fact-checking* yang dirumuskan dalam modul UNESCO (2019, p. 102). Lebih lanjut, peneliti menilai tahapan ini dapat menjadi proses atau tahapan pelengkap dari penjabaran yang ada. Peneliti menafsirkan bahwa tahap terakhir berupa pengoreksian klaim yang dijabarkan dalam modul UNESCO, setingkat dengan tahapan penulisan pada aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*. Hal ini dikarenakan dalam tahap pengoreksian klaim terdapat proses evaluasi klaim berdasarkan bukti dan skala kebenaran (UNESCO, 2019, p. 102). Peneliti menilai hal ini juga dilakukan dalam proses penulisan konten *fact-checking* di *Tirto.id*, di mana pemeriksa fakta mengoreksi catatan dengan menganalisis klaim dan bukti yang didapatkan, serta membuat simpulan penilaian di akhir tulisan. Di sisi lain, Mantzarlis dalam modul UNESCO (2019, p. 102) juga tidak menjelaskan lebih jauh dan spesifik apakah tahap mengoreksi klaim juga mencakup tahap publikasi dan pemberian *rating* penilaian pada isu atau unggahan yang dikaji. Sebab itu, peneliti menilai dan menafsirkan bahwa tahapan penyuntingan dan publikasi, serta pemberitan *rating* penilaian dapat menjadi

tahap atau proses pelengkap dari tahapan *fact-checking* yang dijabarkan dalam modul UNESCO (2019, p. 102).

## 5.2. Saran

### 1. Saran Akademis

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang potensi bias yang dapat muncul dalam aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*. Sejalan dengan tujuan, penelitian ini berhasil untuk memetakan berbagai potensi bias yang dapat muncul dan berpotensi memengaruhi aktivitas dan hasil konten *fact-checking* di *Tirto.id*. Penelitian ini berhasil memetakan hal tersebut dari sudut pandang pemeriksa fakta (media) dan aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id* yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode atau sifat penelitian yang berbeda agar memperkaya kajian tentang bias dan *fact-checking* yang masih minim di Indonesia. Sebagai contoh, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dalam metode kuantitatif dengan subjek masyarakat yang mengonsumsi konten *fact-checking*, seperti tingkat kepercayaan, atau efektivitas konten *fact-checking* seperti yang peneliti temukan dalam jurnal terdahulu. Selain itu, penelitian kualitatif ini tidak mengkaji seberapa sering potensi bias yang sudah didapatkan ini muncul atau dipraktikkan dalam kegiatan *fact-checking* di *Tirto.id*. Maka dari itu, penelitian

selanjutnya dapat mengkaji hal ini dalam kegiatan *fact-checking* di media yang sama, yakni *Tirto.id*.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga masih terbatas dilakukan hanya pada satu media saja, yakni *Tirto.id*. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi dalam praktik *fact-checking* di media pemeriksa fakta lain di Indonesia. Hasil penelitian hanya sekadar dapat dijadikan bacaan rujukan bagi media pemeriksa fakta lain. Maka dari itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memetakan atau merumuskan potensi bias yang dapat terjadi dalam aktivitas *fact-checking* pada beberapa media pemeriksa fakta. Alhasil, pemetaan akan potensi bias dapat digeneralisasi dan dipahami sebagai dasar panduan untuk mengenali dan meminimalisasi bias pada berbagai media pemeriksa fakta di Indonesia.

Hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian lanjutan tentang bias dan *fact-checking* dalam lingkup jurnalistik. Penelitian bias dan aktivitas *fact-checking* menjadi lebih kaya, serta kajian tentang bias dalam aktivitas *fact-checking* juga lebih mendalam.

## **2. Saran Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan dan diinterpretasi, peneliti menilai bahwa secara garis besar aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id* pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Pemeriksa fakta berusaha melakukan kegiatan *fact-checking* dengan standar penilaian IFCN dalam

menyajikan konten untuk masyarakat. Walaupun demikian, bias atau kecenderungan pada dasarnya tidak dapat terlepas dari praktik produksi konten media, tetapi dapat dikenali dan diminimalkan sebagai upaya menyajikan konten yang terbaik untuk masyarakat.

Peneliti menilai bahwa beberapa faktor memengaruhi aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id* dan berpotensi memunculkan berbagai bias atau kecenderungan yang tidak mendasarkan pada kepentingan masyarakat. Hal ini juga memengaruhi sajian informasi yang diterima oleh masyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian ini untuk memetakan potensi bias dalam aktivitas *fact-checking* di *Tirto.id*, peneliti mendapati bahwa terdapat potensi bias selektivitas isu (*bias by omission*), bias pemilihan narasumber, bias heuristik ketersediaan, bias penyuntingan dua tahap, serta potensi temuan atau simpulan yang bertolak belakang. Berbagai potensi bias ini dapat terjadi dalam empat tahapan *fact-checking* di *Tirto.id*.

Kajian akan munculnya potensi bias ini dapat menjadi panduan dalam melakukan proses penyajian konten *fact-checking* di *Tirto.id*. Pemeriksa fakta *Tirto.id* dapat memahami potensi bias yang dapat terjadi, mengenali, serta berhati-hati pada tahapan yang rentan berpotensi bias. Peneliti menyarankan agar pemeriksa fakta dan editor *fact-checking* lebih memprioritaskan pertimbangan selektivitas isu pada bingkai etis (normatif) pemberitaan dan kebutuhan masyarakat, daripada kepentingan individu, media, dan rekanan kerja sama organisasi media. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar pemeriksa fakta

*Tirto.id* selalu melakukan pemeriksaan rekam jejak narasumber dalam proses pencarian bukti, baik yang direkomendasikan oleh reporter atau dipilih langsung oleh pemeriksa fakta. Peneliti juga menyarankan agar setiap konten *fact-checking* yang akan dipublikasikan melewati proses pemeriksaan dua tahap, tidak hanya isu sensitif atau berisiko saja terutama bagi *newsroom Tirto.id*.

Peneliti juga melihat bahwa perlunya kebijakan redaksi *Tirto.id* yang secara normatif dibuat sebagai panduan melakukan kegiatan *fact-checking*, terutama dalam tahap monitoring isu dan pencarian bukti agar meminimalkan dasar pertimbangan individu pemeriksa fakta dan editor *fact-checking* di *Tirto.id*. Selain itu, peneliti melihat sangat perlunya pemeriksa fakta atau editor berhati-hati pada pemahaman isu hasil distorsi informasi berupa opini atau interpretasi orang lain yang dapat memengaruhi analisis dan simpulan konten *fact-checking* di *Tirto.id*. Hal ini berbahaya karena rentan dilakukan, baik secara sadar maupun tidak. Maka dari itu, peneliti menilai sangat diperlukannya pemeriksaan dua tahap pada setiap konten *fact-checking* untuk meminimalisasi bias hasil distorsi seperti ini dalam konten *fact-checking* yang disajikan *Tirto.id*.